

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Solekhan, Moch, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Malang: Setara Press, 2014)
- Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015)
- H. A.Muni Fahmal, *Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008)
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: PSH UII, 2001)
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*
- Sutrisno Purwohadi Mulyono, *Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Masalah Masalah Hukum, Volume 43 Nomor 3, Juli (Semarang, 2014)
- Baswir, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1999)
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009)
- Mardiasmo, *Akuntabilitas Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2003)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019)

Bambang Waluyo, penelitian Hukum Dalam praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018)

Kartini Kartono, *Pengantar Metodoogi Riset Sosial*, (Bandung: Mundur Maju, 1996)

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008)

Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004)

Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009)

B. PERATURAN NASIONAL

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2018

C. JURNAL

A Zakarsi, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi, Volume 2 Nomor 1, Juni (Jambi, 2019)

Chandra Kusuma Putra, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 6, Maret (Malang, 2013)

Moh Sofiyanto, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*, Jurnal Ilmiah Riset Manajemen, Volume 6 Nomor 4, Agustus (Malang, 2017)

Siti Muslihah, *Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen, Volume 7 Nomor 1, July (Yogyakarta, 2019)

- Paramita Nur Kurniati, *Dana Desa Sebagai Instrumen Pembangunan Daerah*, Jurnal Sosial Soedirman, Volume 2 Nomor 2, Juli, (Purwokerto, 2019)
- Merry Inggrid Siwy, *Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado*, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing, Volume 7 Nomor 2, Desember, (Manado, 2016)
- Herlina Ilyas, *Peran Apip Dan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menuju Good Village Governance: Pendekatan Konsep Muroqobah*, Jurnal ASSETS, Volume 6 Nomor 2, Desember (Makassar, 2016)
- M. Laica Marzuki, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 4, Agustus (Jakarta, 2010)
- Tubagus Muhammad Nasarudin, *Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan*, Jurnal Hukum Novelty, Volume 7 Nomor 2, Agustus (Lampung, 2016)
- Ayu Desiana, *Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, (Jambi, 2013)
- H Sugiarto, *Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah*, Jurnal Yuridika, Volume 33 Nomor 1, Januari (Surabaya, 2018)
- Henny Juliani, *Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara*, Administrative Law and Governance Journal, Volume 2 Nomor 4, November (Semarang, 2019)
- Marlaini, *Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu*

Inspektorat Di Aceh), Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 4 Nomor 1, Maret (Aceh: 2018)

Muhammad Zainul Abidin, *Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. Volume 6 Nomor 1, 1 Juni 2015 (Jakarta)

Kadek Cahya Susila Wibawa, *Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*, Administrative Law & Governance Journal, Volume 2 Issue 4, November (Semarang 2019)

Kadek Cahya Susila Wibawa, *Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Administrative Law and Governance Journal, Volume 2 Nomor 2, Juni (Semarang, 2019)

D. INTERNET

Kementerian Keuangan, *Rincian Alokasi Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN T.A. 2019*, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/10/DANA-DESA.pdf>, diakses pada 23 Juni 2020

Jurnal Pemalang, Diduga Selewengkan DD, Kades Desa Pakembaran Digruduk Warga, diakses dari <https://www.jurnalpemalang.co.id/2020/01/diduga-selewengkan-dd-kades-des.html>, pada tanggal 8 Juli 2020 pukul 18.20

Ihsanuddin, ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-des-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>, pada tanggal 8 Juli 2020 pukul 18.23.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Bagaimana Pengawasan Dana Desa dilakukan?*,

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-pengawasan-dana-desa-dilakukan>, diakses pada tanggal 18 Juni 2020

Pemerintahan Kabupaten Pemalang, *Profil Kabupaten Pemalang*, <https://www.pemalangkab.go.id/profil-kabupaten-pemalang/>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2020

Inspektorat Kabupaten Pemalang, *Rencana Strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021*, <https://inspektorat.pemalangkab.go.id/wp-content/uploads/2019/04/Renstra-2016-2021-Inspektorat-new.pdf>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2020

Inspektorat, *Pemeriksaan Khusus*, <https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/jawa-timur/kabupaten-magetan/pemeriksaan-khusus>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2020

E. WARTA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat, *Menatap Dimensi Baru Pengawasan Intern*, Warta Pengawasan: Membangun Good Governance Menuju Clean Government, Volume XIX Nomor 4, Desember (Jakarta, 2012)

F. SKRIPSI DAN TESIS

Cahyaningrum, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019)

Laila, Ira, *Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kota Subulussalam*, (Tesis Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, 2017)

Fandi Achmad Fauzi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Tentang Penyalan Lampu Utama Sepeda Motor Pada*

*Siang Hari Di Kota Bandar Lampung, (Skripsi Sarjana Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Lampung)*

*Abdul Haris, Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai
(Studi Tentang Pengawasan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun
2014 Pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai), (Tesis Magister
Administrasi publik, Program Pascasarjana Di Universitas Medan
Area, 2017)*